

PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Unit Eselon II : Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
 Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET		
		Satuan	Jumlah	
I	2	3	4	
1.1 Meningkatkan Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL dan 95% LKPD	Outcome			
	1.1.1	Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan	%	100
	1.1.2	Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP	%	95
	1.1.3	Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar	%	82
	1.1.4	Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat	%	100
	1.1.5	Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat	%	100
	1.1.6	Persentase hasil pengawasan atas permintaan <i>stakeholders</i> yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh <i>stakeholders</i>	%	93,33
	1.1.7	Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi	%	70
	Output			
	1.1.1.1	Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian	Laporan	2
	1.1.1.2	Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Palsoskam	Laporan	15
	1.1.2.1	Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKPD	Laporan	34
	1.1.3.1	Laporan Hasil Pengawasan Atas Proyek PHLN	Laporan	30
	1.1.4.1	Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian	Laporan	14
	1.1.4.2	Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Palsoskam	Laporan	13
	1.1.4.3	Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah	Laporan	8
	1.1.5.1	Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Perekonomian	Laporan	1
1.1.5.2	Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Palsoskam	Laporan	19	
1.1.5.3	Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah	Laporan	8	
1.1.5.4	Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Akuntan Negara	Laporan	0	
1.1.6.1	Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian	Laporan	0	
1.1.6.2	Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Palsoskam	Laporan	17	
1.1.6.3	Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah	Laporan	13	
1.1.7.1	Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKBUMD	Laporan	12	
1.2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%	Outcome			
	1.2.1	Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti	%	87,5
	1.2.2	Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat	%	100
	Output			
1.2.1.1	Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Palsoskam	Laporan	1	
1.2.2.2	Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah	Laporan	56	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
2.1 Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya CG pada 75% BUMN/BUMD	<p>Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal</p> <p>Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi/GCG/KPI</p> <p>Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja</p> <p>Output</p> <p>2.1.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik</p> <p>2.1.2 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat</p> <p>2.1.3 Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja BUMD</p>	% % % Laporan Laporan Laporan	100 100 100 4 3 1.2
3.1 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%	<p>Outcome</p> <p>3.1.1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi</p> <p>3.1.2 IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD bersiko final yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP</p> <p>3.1.3 Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK</p> <p>3.1.4 Persentase pelaksanaan pengurusan HKP, klaim dan penyusunan harga</p> <p>3.1.5 Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA</p> <p>3.1.6 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang</p> <p>Output</p> <p>3.1.1.1 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi</p> <p>3.1.2.1 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP</p> <p>3.1.3.1 Laporan Hasil Kajian Pengawasan</p> <p>3.1.4.1 Laporan Hasil Audit investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga</p> <p>3.1.5.1 Laporan Hasil Audit investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi Penyidik</p> <p>3.1.6.1 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya</p> <p>3.1.6.2 Laporan Hasil Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat</p>	Kel. Masy Instansi Instansi % % % % Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	3 2 1 84 85 50 6 5 1 6 43 4 2
4.1 Meningkatkan Kualitas Penerapan SPIP di K/L, Pemda Sebesar 70%	<p>Outcome</p> <p>4.1.1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008</p> <p>4.1.2 Jumlah Pemda yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008</p> <p>4.1.3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern</p> <p>Output</p> <p>4.1.2.1 Jumlah Peserta Diklat SPIP</p> <p>4.1.3.1 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP</p> <p>4.1.5.2 Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polcoskam</p> <p>4.1.5.3 Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah</p>	% Pemda Pemda Orang Pemda Laporan Laporan	68,75 8 8 30 7 2 14
5.1 Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda;	<p>Outcome</p> <p>5.1.1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA</p> <p>Output</p> <p>5.1.1.1 Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah</p>	%	75 4

